



Nomor : 010/AM-SDA/OJK/IV/20256
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Keberlanjutan
BPRS Annisa Mukti Tahun 2025

Sidoarjo, 29 April 2026

Kepada Yth,
Pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kantor Regional 4 Jawa Timur
Jl. Gubernur Suryo No.28-30, Embong Kaliasin,
Kec. Genteng, Surabaya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengacu pada POJK No. 51 Penerapan Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif ditegaskan BPR wajib menyampaikan Laporan Keberlanjutan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Oleh karenanya, menunjuk perihal dimaksud kami menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) BPRS ANNISA MUKTI Tahun 2025

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

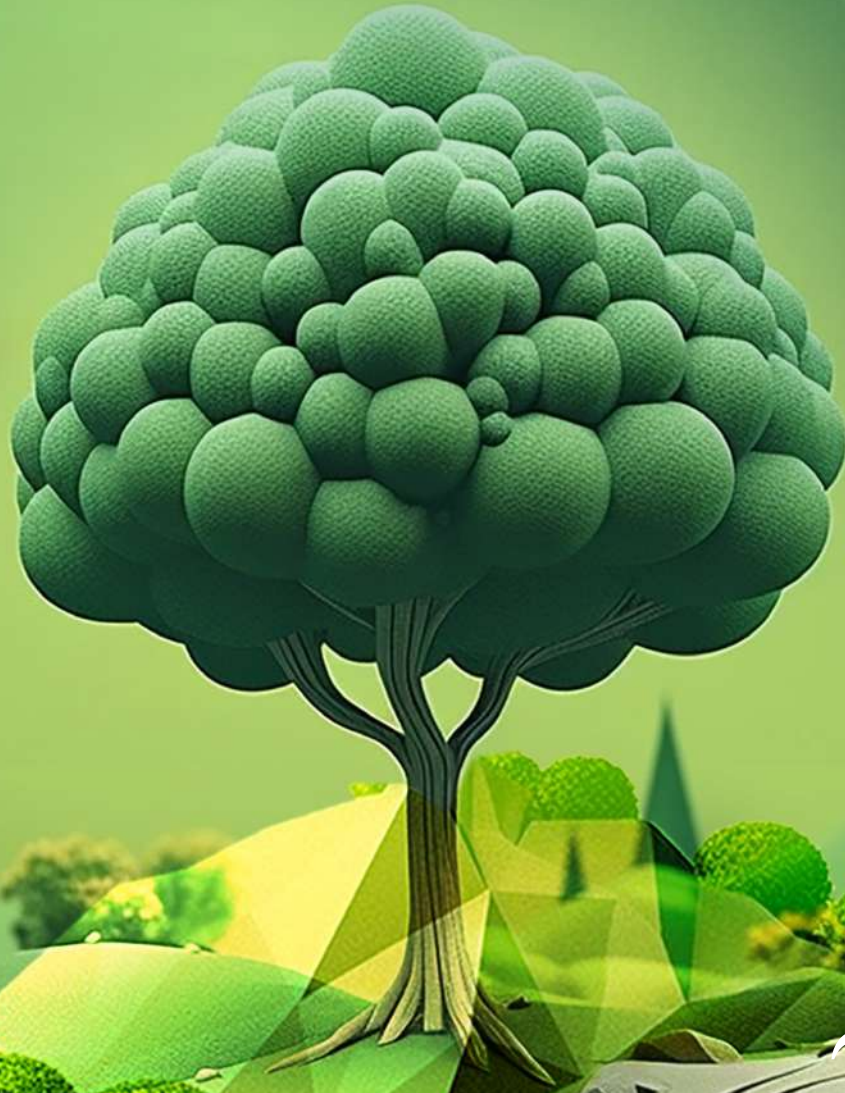
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BPR Syariah Annisa Mukti
Direksi,

Khaerul Hamdani
Direktur Utama



BPR SYARIAH ANNISA MUKTI



2025

**LAPORAN
KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY
REPORT**

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan	7
2.1. Kinerja Ekonomi	7
2.2. Kinerja Lingkungan Hidup	9
2.3. Kinerja Sosial	10
2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	11
3. Profil Bank	13
4. Penjelasan Direksi	15
5. Tata Kelola Keberlanjutan	22
Umpan Balik	27

Kata Pengantar

Pada tahun 2025, BPR SYARIAH ANNISA MUKTI telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR SYARIAH ANNISA MUKTI menerapkan program-program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat)/ BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip triple bottom line yaitu people (kesejahteraan masyarakat), profit (keuntungan) dan planet (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).



BPR SYARIAH ANNISA MUKTI berfungsi sebagai lembaga perantara yang mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pengurus BPR Syariah Annisa Mukti diwajibkan memilih debitur dengan hati-hati, menghindari usaha yang merusak lingkungan, memfokuskan pada proyek yang meningkatkan kesejahteraan sosial, sekaligus memperoleh keuntungan melalui pendapatan margin dan/atau bagi hasil atas penyaluran dana.

BPR SYARIAH ANNISA MUKTI bertekad mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan sebagai upaya bersama sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP), sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan bank. Ketidaktahuan terhadap isu lingkungan dan sosial dapat meningkatkan risiko perbankan, khususnya risiko kredit akibat gagal bayar (default) Debitur yang menjalankan usaha dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat menimbulkan risiko tambahan bagi bank.

Laporan Keberlanjutan (SR - Sustainability Report) BPR SYARIAH ANNISA MUKTI Tahun 2025 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPR SYARIAH ANNISA MUKTI dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk kedua kalinya menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2026 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dan wajib disampaikan kepada OJK secara parallel run yaitu melalui APOLO dan luring (offline) paling lambat sesuai dengan batas waktu pelaporan yaitu tanggal 30 April 2026.

Dengan demikian BPR SYARIAH ANNISA MUKTI menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.



1. Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan



Sesuai POJK Nomor 51 /POJK. 03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (Sustainability Report) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026 bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) merupakan dokumen publik yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, Emiten, serta Perusahaan Publik dalam praktik bisnis berkelanjutan.

Merujuk pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, format penulisan Laporan Keberlanjutan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan BPR SYARIAH ANNISA MUKTI tahun 2025 disusun mengacu pada standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK. 03/2017 mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini bersinggungan erat dengan laporan tahunan yang disusun lengkap dengan laporan keuangan teraudit bagi tahun buku 2025. BPR SYARIAH ANNISA MUKTI menyusun dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam satu periode tahunan, dimulai tahun 2025. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR SYARIAH ANNISA MUKTI tahun 2025 berisi data dan informasi yang dikumpulkan selama satu tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Pengaturan konten dalam Laporan ini disusun mengikuti POJK 51/POJK. 03/2017 dan didasari oleh dua prinsip, yaitu prinsip isi dan prinsip kualitas.

Isi prinsip mencakup:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) disusun sesuai dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Data ditampilkan baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif guna melengkapi pemahaman pembaca.

Kualitas didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Keseimbangan: Informasi mengenai capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan ditampilkan selama tiga tahun terakhir.
3. Akurasi: Semua angka dan data telah dievaluasi di dalam Bank, sehingga keakuratannya dianggap dapat dipercaya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini dikirim tepat waktu bersamaan dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Data yang dipresentasikan dalam dokumen tersebut dapat dengan mudah dicerna.

Topik material yang dimuat dalam Laporan ini merupakan isu-isu yang telah diutamakan oleh organisasi untuk



disertakan. Kriteria penentuan prioritas meliputi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini juga mencakup dampak positif. Penetapan aspek material dan batasannya didasarkan pada isu-isu penting bagi BPR SYARIAH ANNISA MUKTI serta semua pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, BPR merujuk pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR SYARIAH ANNISA MUKTI adalah:

1. Investasi yang bertanggung jawab; merupakan pendekatan investasi yang memikirkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam setiap keputusan investasi, dengan tujuan untuk mengelola risiko lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak merugikan lingkungan, dengan menganalisis potensi risiko yang dapat timbul dari usaha yang dibiayai oleh Bank.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan; Kami menerapkan prinsip ini dengan menanamkannya dalam kebijakan keberlanjutan yang dituangkan ke dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan), yang menjadi dasar bagi BPR SYARIAH ANNISA MUKTI dalam menjalankan kegiatan usaha bank secara berkelanjutan.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup; Kami telah mengadopsi prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam menilai risiko yang diurus oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko finansial, kami juga menerapkan proses manajemen risiko khusus, terutama dalam menilai risiko pemberian kredit atau pinjaman yang secara langsung memengaruhi aspek sosial dan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. (Prudential Banking)
4. Prinsip Tata Kelola; Kami berkomitmen menerapkan tata kelola keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, berdasarkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). (Good Corporate Governance), yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif; Kami menyajikan laporan informatif yang mencakup strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek Bank, yang dapat diakses secara mudah oleh para stakeholder melalui situs web BPR SYARIAH ANNISA MUKTI <https://www.bprgodital.co.id/stakeholder>
6. Prinsip Inklusif; Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabah. Bank memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan BPR SYARIAH ANNISA MUKTI.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mengacu pada sektor- sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini bertujuan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta memfasilitasi program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi; Kami terbuka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lembaga atau pemerintah setempat terkait Bisnis Berkelanjutan guna menyelaraskan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini tercermin dari keanggotaan perusahaan pada Perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan yang memberdayakan masyarakat.



Berbeda, tiga fokus utama RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) adalah:

1. Pengembangan produk atau jasa keuangan berkelanjutan mencakup identifikasi dan pengawasan portofolio pembiayaan Bank yang mendukung tujuan keuangan berkelanjutan.
2. Peningkatan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui pengembangan kesadaran tentang keuangan berkelanjutan (bagi pegawai dan nasabah), penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional, termasuk penyiapan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, serta penyesuaian kebijakan internal Bank lain seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, dan Kebijakan tata kelola keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun dengan memperhatikan visi dan misi Bank dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, implementasi keuangan berkelanjutan tidak sekadar mematuhi regulasi, melainkan juga menjadi strategi untuk mewujudkan visi Bank, khususnya dalam mengaplikasikan prinsip inklusi keuangan.

Bank menargetkan segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagai sasaran utama dalam penyediaan jasa keuangan, dengan harapan dapat meminimalkan kesenjangan sosial yang ada. Lebih lanjut, melalui pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berusaha memperkuat peran dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - "Sustainable Development Goals"). Hal ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk penyusunan rencana kerja dan pengembangan RAKB sesuai peraturan regulator. Sustainable Development Goals.

Sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR SYARIAH ANNISA MUKTI mulai menerapkan prinsip-prinsip go green company sejak mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Mengajak setiap kantor BPRS untuk menggunakan air dengan bijak di toilet masing-masing dengan menaruh pamflet “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengkampanyekan lingkungan kerja yang lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT” melalui penempatan pamflet di area yang mudah terlihat.



3. Menerapkan program “Hemat Energi” dengan membatasi penggunaan AC serta mematikan lampu di ruang yang tidak terpakai setelah jam kerja.
4. Program penggunaan tumbler sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.





2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan			
Total Aset	18.841.641.385	18.190.451.323	19.713.675.977
Aset Produktif	18.417.028.917	17.642.890.674	18.776.738.258
Kredit/Pembiayaan Bank	11.243.286.663	13.316.842.485	13.298.426.866
Dana Pihak Ketiga	8.528.849.489	8.608.485.728	9.915.563.669
Pendapatan Operasional	2.662.061.724	2.715.589.872	3.003.819.322
Beban Operasional	2.362.782.905	2.342.594.661	2.429.735.097
Laba Bersih	260.761.769	327.031.820	509.654.145
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	69,91	57,48	64,56
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0	0	0
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	7,41	6,36	1,21
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	0	0	0
NPL gross	12,14	8,43	1,70
NPL nett	9,84	6,61	0,36
Return on Asset (ROA)	1,60	2,12	3,04
Return on Equity (ROE)	5,70	7,29	0
Net Interest Margin (NIM)	13,14	14,17	15,21
Rasio Efisiensi (BOPO)	89,07	88,47	80,40
Loan to Deposit Ratio (LDR)	131,83	154,69	134,12
Cash Ratio	51,60	35,52	39,34

Selama periode tahun 2023 hingga 2025, PT BPR SYARIAH ANNISA MUKTI mencatatkan kinerja pertumbuhan aset yang menunjukkan tren positif dan berkelanjutan. Total aset Perseroan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp19.713.675.977,00 kemudian mengalami penurunan Rp 18.190.451.323,00 pada tahun 2024, dan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 418.841.641.384,00 pada tahun 2025.

Terdapat peningkatan aset BPR SYARIAH ANNISA MUKTI di antara tahun 2024 dan tahun 2025.

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
------------	-------------	----------------	----------------	----------------



Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	2	2	2	2
a.1. DPK	2	2	2	2
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	1	1	1	1
b.1. Kredit / Pembiayaan	1	1	1	1
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	8.438.313.498	8.528.849.488	8.608.485.728	9.915.563.669
a.1. DPK	8.438.313.498	8.528.849.488	8.608.485.728	9.915.563.669
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	11.751.872.641	11.243.286.663	13.316.842.485	13.298.427.000
b.1. Kredit / Pembiayaan	11.751.872.641	11.243.286.663	13.316.842.485	13.298.427.000
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	8.438.313.498	8.528.849.488	8.608.485.728	9.915.563.669
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	11.751.872.641	11.243.286.663	13.316.842.485	13.298.427.000
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	100%	100%	100%	100%
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. DPK	100%	100%	100%	100%
b.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-



f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	11.751.872.641	11.243.286.663	13.316.842.485	13.298.427.000
Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	11.751.872.641	11.243.286.663	13.316.842.485	13.298.427.000

Total outstanding penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM di tahun 2025 tercapai Rp 11.243.286.663 dari target Rp 11.751.872.641 dengan tingkat realisasi sebesar 95,67%

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL



BPRS ANNISA MUKTI mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sosialisasi atas prinsip-prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional BPRS ANNISA MUKTI tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di lingkungan BPRS.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan tumbler atau botol minum tidak habis pakai yang disiapkan pegawai masing-masing.



Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	4.728	4.378	4.643	4.157
b. Penggunaan Listrik (kWh)	22.363	19.446	24.736	25.240
c. Penggunaan Air (m3)	384	379	379	379
d. Penggunaan Kertas (kg)	60	50	48	47

Total Emisi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (a + b + c - d)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi

Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi

BPRS Annisa Mukti berkomitmen pada inklusivitas keuangan memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	-	-	-
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referral Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPRS Annisa Mukti memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di kota Surabaya.



Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	14	14	15	14
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	3	3	3	3
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	3	3	3	3
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	-	-	-	-
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

BPRS ANNISA MUKTI ikut berkontribusi memberikan sebagian dari laba yang disisihkan untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	-	70.353.000	81.331.500	89.278.300
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	1	1	1	1

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, BPRS ANNISA MUKTI senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, BPRS ANNISA MUKTI melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun inovasi dan pengembangan produk/ jasa yang dilakukan BPRS ANNISA MUKTI selama tahun 2025 antara lain meluncurkan Program Pembiayaan BPRS ANNISA MUKTI.

Selain itu, Perusahaan juga mengembangkan program Credit Scoring, program Pembuatan Aplikasi Monitoring Pembiayaan



Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPRS ANNISA MUKTI telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perseroan secara kontinu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, BPRS ANNISA MUKTI juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPRS ANNISA MUKTI telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPRS ANNISA MUKTI akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPRS ANNISA MUKTI pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPRS ANNISA MUKTI maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPRS ANNISA MUKTI belum melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2025 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.



3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPRS ANNISA MUKTI
Alamat	Jl Letjen Suprpto 12C, Kepuhkiriman, Waru, Sidaorjo
Nomor Telepon	0318673930
Email	bprsamsda@gmail.com
Website	www.https://annisamukti.co.id/

Skala Usaha Bank

Total Aset dan Kewajiban

Jumlah aset di tahun 2025 sebesar Rp 18.841.641.384 mengalami fluktuasi aset BPRS dalam 2 tahun terakhir.

Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2025 BPRS Annisa Mukti memiliki SDM total 14 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai. Demografi psecara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Persentasi Kepemilikan Saham

Komposisi Pemegang Saham BPRS Annisa Mukti posisi 31 Desember 2025

1. Tjie Steffen Sebastian sebesar 36,75% Sebagai PSP
2. Edwin Surya Laksana sebesar 25,00% Sebagai PSP
3. Gijan Ongkoredjo sebesar 20,75% Non PS
4. Anik Lestari Mukti, S.H sebesar 17,50% Non PS

Produk dan Layanan

- Tabungan Annisa Syariah
- Simpanan Ibadah Annisa (Si Ibad)
- Tabungan wadiah
- Deposito
- Penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan Dengan Akad jual beli (Piutang Murabahah)
- Penyaluran dana pembiayaan dengan akad bagi hasil (Pembiayaan Musyarakah)



Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota HIMBARS (Perhimpunan BPRS Seluruh Indonesia)

Penjelasan Lainnya

BPRS Annisa Mukti berkomitmen untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan usaha yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung pemberdayaan sektor usaha mikro dan kecil.



4. Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

BPRS Annisa Mukti berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dengan menjadi BPRS Annisa Mukti yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), BPR menetapkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, BPRS Annisa Mukti juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025.

Target yang ditetapkan oleh BPRS Annisa Mukti yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan



Kuangan Berkelanjutan dan menerapkan operasional Perbankan Hijau (green banking).

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional Bank yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Strategi Pencapaian Target

BPRS Annisa Mukti senantiasa meningkatkan strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPRS Annisa Mukti tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan.

Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2025, BPRS Annisa Mukti belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



BPRS Annisa Mukti kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.



Apresiasi

BPR/s memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di BPRS ANNISA MUKTI. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

1. Fokus Bisnis Bank

Kendala dalam implementasi keuangan berkelanjutan pada BPRS ANNISA MUKTI seringkali berhubungan dengan kemampuan internal organisasi untuk beradaptasi dari fokus laba instan menjadi perkembangan yang menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Triple bottom line).



2. Operasional Bank

Dilihat dari sudut pandang operasional BPRS ANNISA MUKTI, kesulitan utama dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan terletak pada bagaimana prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social and Governance) atau LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pemberian kredit, pelayanan kepada nasabah, hingga penyusunan laporan. Seringkali, terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan yang tertulis dan implementasinya di lapangan.

3. Kebijakan Internal

BPRS ANNISA MUKTI belum sepenuhnya memiliki pedoman internal yang secara jelas dan komprehensif untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, maupun Kebijakan Penerapan Tata kelola.

4. Keahlian SDM Bank

1. BPRS ANNISA MUKTI menyadari bahwa belum ada SDM yang ditugaskan sebagai spesialis ESG (Environmental, Social and Governance) atau Sustainability Officer. Fungsi ini biasanya dirangkap oleh Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang juga memiliki beban kerja besar dan perangkapan jabatan.
2. Kemampuan identifikasi risiko lingkungan dan sosial. Analisis kredit umumnya dilatih untuk membaca laporan keuangan dan arus kas, namun belum terbiasa menilai potensi pencemaran, keselamatan kerja, konflik sosial, atau kepatuhan usaha terhadap regulasi lingkungan hidup.

5. Lainnya

Tantangan lainnya yang tidak kalah beratnya adalah profil dan kesiapan debitur. Mayoritas nasabah BPR berasal dari segmen mikro dan kecil yang umumnya belum memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menerapkan praktik usaha ramah lingkungan. Banyak usaha masih informal, sehingga sulit menyediakan dokumen legalitas, izin lingkungan, atau bukti pengelolaan limbah.

Upaya yang dilakukan

Bagi BPRS ANNISA MUKTI menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bukan sekedar memenuhi POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, tetapi bagaimana membuat prinsip tersebut realistis dijalankan dengan kapasitas Bank yang relatif terbatas.

Karena itu, upaya yang dicoba dilakukan oleh dilakukan bersifat bertahap, praktis, dan menyesuaikan profil nasabah UMKM. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen manajemen
Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan arah strategis melalui kebijakan, rencana aksi, serta penyediaan sumber daya. Tone from the top (sikap, tindakan, dan perilaku etis dari pemimpin tertinggi organisasi dewan direksi, manajemen senior) penting agar seluruh unit memahami bahwa keberlanjutan adalah bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar proyek tambahan
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang sederhana
BPR menerjemahkan prinsip ESG ke dalam panduan praktis, misalnya daftar sektor yang dibatasi, klasifikasi risiko rendah–tinggi, serta checklist singkat bagi account officer. Pendekatan ini membuat implementasi lebih mudah diterapkan.



3. Peningkatan kapasitas SDM
Dilakukan melalui pelatihan rutin, workshop studi kasus UMKM, serta pembekalan cara identifikasi risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kondisi lapangan.
4. Integrasi ke proses kredit
Aspek keberlanjutan mulai dimasukkan dalam tahap analisis, persetujuan, hingga monitoring. Tidak harus rumit, tetapi cukup memastikan adanya pertimbangan dampak lingkungan dan sosial.
5. Pengembangan produk dan insentif
Misalnya pemberian suku bunga atau persyaratan yang lebih baik bagi usaha yang menjalankan praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah, atau efisiensi energi.
6. Peningkatan kualitas data dan pelaporan
Walaupun sistem IT terbatas, BPR dapat memulai dengan template manual atau penandaan portofolio untuk memudahkan kompilasi data secara bertahap.
7. Edukasi dan pendampingan nasabah
Karena banyak debitur belum memahami isu keberlanjutan, bank dapat memberikan sosialisasi ringan mengenai manfaat praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.
8. Kerja sama dengan pihak eksternal
BPR dapat menggandeng dinas pemerintah, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping guna membantu penilaian maupun pembinaan debitur.
9. Implementasi bertahap berbasis prioritas
Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada BPRS ANNISA MUKTI tidak harus langsung sempurna. Fokus dapat dimulai dari sektor dengan risiko tinggi atau peluang hijau yang paling memungkinkan di wilayah kerja.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah

Dari sisi eksternal, khususnya yang bersumber dari kebijakan dan lingkungan regulasi pemerintah dan regulator, BPRS ANNISA MUKTI sering menghadapi dinamika yang tidak sederhana dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Walaupun arah kebijakan nasional mendorong praktik ESG, penerjemahannya pada bank berskala kecil seperti BPR membutuhkan penyesuaian yang cukup besar.

Beberapa tantangan yang umum dirasakan antara lain berikut.

1. Perubahan dan perkembangan regulasi yang cepat.
Ketentuan mengenai keuangan berkelanjutan, pelaporan, maupun klasifikasi kegiatan hijau terus berkembang. BPR perlu waktu untuk memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan proses internalnya.
2. Kebutuhan pelaporan yang semakin detail.
Permintaan data portofolio berkelanjutan sering memerlukan pemetaan sektor dan informasi debitur yang belum tentu tersedia. Bagi BPR dengan infrastruktur terbatas, ini menjadi beban tambahan.
3. Standar yang cenderung mengacu pada praktik bank umum.
Sebagian pedoman dirancang dengan asumsi kapasitas bank besar, sehingga implementasinya pada BPR memerlukan penyederhanaan atau interpretasi khusus.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Secara garis Besar BPRS ANNISA MUKTI menghadapi tantangan secara eksternal dan jika dipetakan menjadi hal-hal sebagai berikut sesuai pada gambaran pada masing-masing level di bawah ini.

Tingkat Nasional



Di tingkat nasional, isu utama biasanya berkaitan dengan struktur ekonomi dan kesiapan pelaku usaha.

Pertama, ketergantungan pada sektor tertentu yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Peralihan menuju praktik yang lebih hijau membutuhkan biaya dan waktu, sehingga permintaan pembiayaan berkelanjutan belum tumbuh cepat.

Kedua, kesenjangan literasi dan kapasitas UMKM. Sebagian besar pelaku usaha masih fokus pada keberlangsungan bisnis jangka pendek sehingga investasi pada teknologi atau proses yang lebih berkelanjutan belum menjadi prioritas.

Tingkat Regional (daerah/wilayah)

Pada level regional, variasi kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur sangat memengaruhi.

Banyak daerah menghadapi keterbatasan akses teknologi hijau, minimnya konsultan atau lembaga pendukung, serta belum berkembangnya rantai pasok yang berkelanjutan.

Selain itu, prioritas pembangunan daerah sering masih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja cepat, sehingga aspek lingkungan belum selalu menjadi pertimbangan utama.

Kualitas data dan pengawasan lingkungan antar daerah juga bisa berbeda, menyulitkan lembaga keuangan untuk melakukan penilaian yang seragam.

Tingkat Global

Di tingkat global, tekanan datang dari perubahan standar, pasar, dan risiko lintas negara.

Ada peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan standar ESG internasional, yang terus berkembang dan memerlukan penyesuaian.

Fluktuasi ekonomi dunia, perubahan harga komoditas, dan risiko perubahan iklim menimbulkan ketidakpastian investasi.

Selain itu, muncul risiko akses pendanaan internasional yang semakin mensyaratkan kepatuhan pada prinsip keberlanjutan tertentu.

Secara keseluruhan, tantangan pada tiga level ini saling terkait. Kondisi global memengaruhi kebijakan nasional, lalu diterjemahkan secara berbeda di tiap daerah. Lembaga keuangan, termasuk BPR, berada di tengah dinamika tersebut.

3. Lainnya

1. Ciri khas dan kematangan nasabah. Sebagian besar debitur BPR datang dari kalangan usaha mikro dan kecil yang pemahaman lingkungannya masih terbatas. Banyak bisnis yang belum berizin, belum memiliki standar pengelolaan limbah, atau praktik kerja yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyulitkan bank dalam mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan.
2. Pandangan dan penolakan dari pihak peminjam. Persyaratan tambahan atau pertanyaan terkait pengaruh terhadap lingkungan dapat dianggap sebagai penghalang dalam mendapatkan pinjaman. Apabila tidak diatasi dengan tepat, hal ini berpotensi mengurangi ketertarikan calon debitur.

Upaya yang dilakukan



Untuk menghadapi tantangan eksternal dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR Go digital menempuh langkah seperti meningkatkan komunikasi dengan regulator, mengikuti forum industri/ perbarindo, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan yang paling realistis sesuai kapasitas.

Berikut beberapa upaya yang lazim ditempuh oleh BPRS ANNISA MUKTI antara lain:

1. Edukasi dan literasi kepada nasabah.
BPR dapat melakukan sosialisasi sederhana mengenai praktik usaha yang lebih aman bagi lingkungan, manfaat legalitas, serta potensi efisiensi biaya. Pendekatan persuasif ini membantu mengurangi resistensi ketika bank mulai menanyakan aspek ESG.
2. Pendampingan UMKM.
Tidak cukup hanya meminta dokumen; bank membantu debitur memahami apa yang perlu diperbaiki. Misalnya arahan pengelolaan limbah sederhana, keselamatan kerja, atau cara memperoleh izin usaha.
3. Membangun kemitraan lokal.
Kerja sama dengan dinas pemerintah daerah, koperasi, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping dapat membantu penyediaan informasi teknis dan pembinaan tanpa seluruh beban ada pada bank.
4. Mengembangkan produk yang realistis dengan pasar.
Daripada menunggu proyek hijau besar, BPR dapat mendorong pembiayaan yang berdampak sederhana namun nyata, seperti pembiayaan terhadap Kegiatan UMKM, efisiensi energi, pertanian ramah lingkungan, atau pengurangan limbah.
5. Peningkatan komunikasi dengan regulator.
Melalui forum industri atau asosiasi, BPR dapat memperoleh klarifikasi, berbagi praktik baik, serta menyampaikan kendala lapangan sehingga implementasi lebih sesuai dengan kapasitas.
6. Penyederhanaan persyaratan.
Agar tidak menghambat minat debitur, bank dapat menggunakan checklist atau klasifikasi risiko yang proporsional terhadap skala usaha.
7. Penguatan reputasi dan komunikasi publik.
Dengan menunjukkan komitmen pada pembiayaan yang bertanggung jawab, bank dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menarik nasabah yang sejalan.



5.

Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability) , pertanggung jawaban (responsibility) , independensi (independency) , dan kewajaran (fairness) . Selain itu, GCG merupakan prinsip- prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perbankan.

Struktur tata kelola perusahaan BPRS ANNISA MUKTI sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi BPRS ANNISA MUKTI No. SKDir.Godig/02/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Kebijakan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik, adalah sebagai berikut:

1. RUPS: adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris; adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan good corporate governance, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (frame work) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (Governance Structure), Proses Tata Kelola (Governance Process) dan Hasil Tata Kelola (Governance Outcome) . Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (stakeholders) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan

mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang- undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
2. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang- undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) kepada Dewan Komisaris.



4. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
5. Memantau Pejabat Eksekutif satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.



Sebagai BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPRS ANNISA MUKTI berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPRS ANNISA MUKTI secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di BPRS ANNISA MUKTI. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Ketua (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan):

1. Memastikan bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama- sama dengan Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko):

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal-hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;



- Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir (i) di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
- Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	1	1	1
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	-	-	-

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	1	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	1	1	-
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	3	2	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	2	2	2

Pembekalan dilakukan melalui pelatihan yang diikuti oleh seluruh anggota tim. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan serta kategori kegiatan yang tergolong dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Melalui pembekalan tersebut, Bank diharapkan dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB) di masa mendatang.

Dalam rangka mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, telah dilaksanakan sosialisasi program kerja kepada seluruh Sumber Daya Insani (SDI) PT BPRS Annisa Mukti pada tanggal 21 Desember 2025 yang diikuti oleh seluruh karyawan dan pengurus BPRS Annisa Mukti.



Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

BPRS Annisa Mukti berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2025.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, BBPRS Annisa Mukti akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, peran pemegang saham di BPRS ANNISA MUKTI menentukan arah strategis BPRS melalui kewenangan dalam RUPS, penetapan target kinerja, Tingkat komitmen pemegang saham BPRS Annisa Mukti yang tinggi mendorong BPRS ANNISA MUKTI untuk lebih disiplin melaksanakan Keuangan Berkelanjutan.



Pemerintah

Peran pemerintah dalam penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sangat penting, mengingat pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, regulator, sekaligus penggerak ekosistem pembangunan ekonomi. Melalui peran tersebut, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi PT BPRS Annisa Mukti dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara efektif, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha serta penerapan prinsip kehati-hatian.

Otoritas

OJK menerbitkan panduan teknis, contoh praktik, serta klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan. Materi ini membantu BPRS ANNISA MUKTI menerjemahkan konsep ESG ke dalam prosedur operasional sehari-hari.

Akademisi

1. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPRS Annisa Mukti menambah pengetahuan dan referensi dari para akademisi yang akan dijalankan bank sehingga memiliki pendasaran ilmiah dan dapat terus disempurnakan.
2. Akademisi juga menghasilkan riset dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dapat menjadi rujukan bagi BPRS ANNISA MUKTI dalam menyusun kebijakan.

Praktisi

BPRS ANNISA MUKTI juga melakukan sharing experience dengan praktisi perbankan yang lebih awal dan berpengalaman dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Diharapkan Pengalaman dari bank atau lembaga lain membantu BPRS ANNISA MUKTI memahami pendekatan yang sudah terbukti berhasil, termasuk cara sederhana mengintegrasikan ESG tanpa membebani operasional.

Pegawai

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan di BPRS ANNISA MUKTI, pegawai merupakan pelaku utama yang menentukan apakah kebijakan dapat berjalan atau hanya menjadi dokumen. Direksi dapat menetapkan strategi, namun pelaksanaan sehari-hari berada di tangan account officer, analis kredit, petugas operasional, manajemen risiko, hingga fungsi pendukung lainnya.

Nasabah

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, nasabah bukan hanya penerima Kredit / Pembiayaan, tetapi juga partner yang menentukan dampak nyata dari kegiatan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apa yang dilakukan nasabah setelah memperoleh kredit pada akhirnya membentuk kualitas portofolio keberlanjutan di BPRS ANNISA MUKTI.



Lainnya

Asosiasi perbankan/Himbarsi berperan sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik baik antar BPRS. Melalui forum ini, bank dapat memperoleh contoh implementasi termasuk melaksanakan gerakan menanam 1.000 pohon Kelapa, mengikuti pelatihan bersama, dan menyuarkan kendala kepada regulator.

Umpan Balik

BPRS Annisa Mukti ingin memastikan terciptanya komunikasi dua arah sekaligus evaluasi BPRS yang dapat memperbaiki kualitas laporan ke depannya. Untuk itu, kami sediakan Lembaran Umpan Balik pada akhir Laporan Keberlanjutan ini. Lembar ini diharapkan membantu pembaca maupun pengguna laporan memberi usulan, umpan balik, opini, dan lain-lain, yang sangat berharga bagi peningkatan pelaporan di masa mendatang.

BPRS Annisa Mukti membuka akses informasi secara luas kepada semua pemangku kepentingan, investor, dan setiap orang yang bersedia memberikan umpan balik (feedback) mengenai laporan keberlanjutan ini melalui kontak berikut:

Nita Ainul Khasanah

Pejabat Eksekutif Tanggung Jawab Kepatuhan serta Pengelolaan Risiko

PT. BPR Syariah Annisa Mukti

Jl. Letjend Suprpto No. 12c, Kepuhkiriman

Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

WA nomor 0815-5656-0651

Bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar, penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang pertama kali dilakukan, sehingga belum terdapat umpan balik dari para pemangku kepentingan. BPRS Annisa Mukti akan terus melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar laporan yang disajikan dapat memberikan informasi yang lebih jelas, relevan, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembaca.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025
BPRS ANNISA MUKTI**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT. BPRS ANNISA MUKTI
Sidoarjo, 28 April 2026

Direksi,



Khaerul Hamdani S.Kom
Direktur Utama

Dewan Komisaris,


Bambang Eko Wahono S.E
Komisaris Utama


Gusti Abdurrahman S.E
Komisaris

**LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI
BPRS ANNISA MUKTI
TAHUN 2025**

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Direksi	1
2	Pimpinan Kas	1
3	PE Manrisk	1
4	PE Audit Intern	1
5	Account Officer (AO)	2
6	Marketing	2
7	Admin Pembiayaan	1
8	Teller	1
9	Oprs Kantor Kas	1
10	Customer service (CS)	1
11	Staff IT	1
12	Staff Umum	1

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	0
2	S2	0
3	S1	12
4	D3	1
5	SMA	1

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	JABATAN	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI KONTRAK	TOTAL
1	Direksi	1		1
2	Pimpinan Kas	1		1
3	PE Manrisk	1		1
4	PE Audit Intern	1		1
5	Account Officer (AO)	2		2
6	Marketing		2	2
7	Admin Pembiayaan		1	1
8	Teller		1	1
9	Oprs Kantor Kas		1	1
10	Customer service (CS)		1	1
11	Staff IT	1		1
12	Staff Umum	1		1



4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

NO	RENTANG USIA	JUMLAH
1	50 - 60 Tahun	0
2	30 - 49 Tahun	10
3	20 - 29 Tahun	4

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

NO	GENERASI	JUMLAH
1	Generasi X	1
2	Generasi Millennial	9
3	Generasi Z	4



Laporan Realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025

No	Deskripsi Program Kerja	Rencana Pelaksanaan	Realisasi
1	<p>Pembuatan ketentuan mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup dan lingkungan sekitar</p> <p>Tujuan: Peningkatan pengetahuan serta kesadaran tentang Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Indikator Ketercapaian: Peningkatan pengetahuan serta kesadaran tentang Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Direksi</p>	01 Jan 2025 s/d 31 Juni 2025	<i>Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 30 April 2026.</i>
2	<p>Efisiensi Penggunaan Listrik</p> <p>Tujuan: Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi</p> <p>Indikator Ketercapaian: Penghematan biaya listrik sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2023.</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Bagian Umum</p>	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	<i>Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 30 April 2026.</i>
3	<p>Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan</p> <p>Tujuan: Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.</p> <p>Indikator Ketercapaian: Penurunan penggunaan air minum kemasan</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Bagian Umum dan Kepatuhan</p>	01 Okt 2025 s/d 31 Des 2025	<i>Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 30 April 2026.</i>



4	<p>Penyusunan Kebijakan implementasi Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Memiliki SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Indikator Ketercapaian: SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Bagian Kepatuhan</p>	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	<i>Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 30 April 2026.</i>
5	<p>Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Indikator Ketercapaian: Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Direksi</p>	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	<i>Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 30 April 2026.</i>
6	<p>Mengurangi Penggunaan Kertas</p> <p>Tujuan: Penghematan dan mendukung program go green</p> <p>Indikator Ketercapaian: Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2023.</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Bagian Umum dan Kepatuhan</p>	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	<i>Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 30 April 2026.</i>

Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) BPR SYARIAH ANNISA MUKTI ini. Guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang kami berharap kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan di bawah ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan BPR SYARIAH ANNISA MUKTI dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank.

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

2. Materi Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai aspek kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pada BPR SYARIAH ANNISA MUKTI.

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

4. Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

5. Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

6. Laporan Keberlanjutan ini menarik dan mudah dibaca.

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan di masa mendatang?

.....
.....
...

8. Mohon berikan saran dan komentar terhadap Laporan Keberlanjutan ini.

.....
.....
.....

Profil Anda

Nama :
Pekerjaan :
Institusi/Perusahaan :
Kontak (telepon, e-mail) :

Kategori Pemangku Kepentingan

- Pemerintah Nasabah Karyawan Mitra Usaha
 Media Masyarakat LSM Lain-Lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke:

BPR SYARIAH ANNISA MUKTI

JL. LETJEND SUPRAPTO 12C KEPUHKIRIMAN WARU SIDOARJO

Telepon : 0318673930

Website : www.annisamukti.co.id

E-mail : bprs_am@yahoo.co.id